



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS**



K U A

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

2 0 2 6



Let's Start!

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

JL. KABUPATEN NO. 1 PURWOKERTO

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	6
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	6
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	28
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	30
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	30
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	45
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	45
4.2 Target Pendapatan Daerah	49
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	50
5.2 Target Belanja Daerah	55
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1. Kebijakan Terkait Pembiayaan Daerah	56
6.2 Target Pembiayaan Daerah	58
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN	62
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	62
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	66
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	67
BAB 8 PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026	14
Tabel 2 Asumsi Ekonomi Makro APBN 2026	30
Tabel 3 Asumsi Ekonomi Makro APBD 2026	31
Tabel 4 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024	46
Tabel 5 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2026	49
Tabel 6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024	50
Tabel 7 Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Tahun 2026	55
Tabel 8 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2024	56
Tabel 9 Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026	58
Tabel 10 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah diwajibkan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, untuk selanjutnya disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Rancangan KUA pada dasarnya merupakan rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang digunakan untuk menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun.

Rancangan KUA, dimaksud untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

KUA Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rancangan KUA Kabupaten Banyumas Tahun 2026 konsisten terhadap prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif;

2. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul;
3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda;
4. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi;
5. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif;
6. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung;
7. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi;
8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran;
9. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal;
10. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan;
11. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
3. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar *stakeholder*, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
5. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berlandaskan pada :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Anggaran 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);

- 10) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dinamika perkembangan global yang cepat pada seluruh aspek, diperkirakan akan terus menjadi faktor yang turut mempengaruhi perkembangan sekaligus menjadi tantangan bagi kinerja perekonomian nasional dan daerah ke depan, dan diprediksi akan terus mengalami transformasi. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim, perubahan dalam pola konsumsi dan produksi masyarakat global, serta dinamika politik dunia.

Diperkirakan, sejumlah tren utama yang akan mempengaruhi sekaligus membentuk perekonomian dunia pada tahun 2025 hingga 2026 meliputi perkembangan teknologi digital dan otomatisasi termasuk kecerdasan buatan AI dan *Internet of Thing* (IoT). Teknologi ini akan mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, yang apabila tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dan otomatisasi dapat mengakibatkan *job displacement* yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi negara secara signifikan. Di sisi lain, teknologi ini jika diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat dapat mempercepat transisi menuju ekonomi tanpa uang tunai dan membuka peluang baru di sektor keuangan dan teknologi.

Selanjutnya adalah tren ekonomi berkelanjutan yang mulai diterapkan di negara-negara di dunia dan mendominasi kebijakan ekonomi global tahun 2025 hingga 2026. Ini merupakan bentuk respon terhadap perubahan iklim, dimana kebijakan ekonomi semakin menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan menerapkan kebijakan yang mendukung

pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik serta pengelolaan sampah dan daur ulang.

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan tarif, pajak, deregulasi perdagangan, dan efisiensi pemerintah. Ketidakpastian yang tinggi terutama pada seputar jalur kebijakan perdagangan ke depan yang tentunya berkemungkinan meningkatkan hambatan, khususnya bagi negara dan kawasan yang lebih terintegrasi dalam rantai pasokan global.

Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan masih akan lemah. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2025, IMF (*International Monetary Fund*) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.

Kondisi perekonomian global dengan segala peluang dan risiko risikonya, secara langsung dan tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dan daerah. Meskipun demikian, ekonomi nasional tahun 2026 diprediksi tetap menunjukkan kinerja yang resilien dan cukup stabil.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (*yoy*) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 5,1% (y-o-y) dalam rentang estimasi 4,9% hingga 5,7%. Sementara tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-5,80 persen.

Berbagai tantangan dan risiko menyebabkan semakin kompleksnya respons kebijakan yang harus dilakukan. Sehingga, kondisi tersebut dapat menjadi dasar dan pertimbangan pemerintah daerah dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Dan paling penting adalah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Banyumas.

Kondisi perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari kinerja indikator ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat investasi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan serta perkembangan kinerja sektor-sektor ekonominya. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2024 tumbuh melambat sebesar 5,29 persen, namun masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 4,95 persen.

Laju inflasi Kabupaten Banyumas dalam tren yang membaik, tercatat sebesar 1,51% (y-o-y) pada tahun 2024 lebih baik dari capaian tahun 2023 sebesar 2,61% (y-o-y). Namun, tingkat

ketimpangan pendapatan Banyumas yang diukur menggunakan Gini Ratio belum menunjukkan adanya perubahan signifikan menuju arah yang membaik. Angka rasio gini Kabupaten Banyumas tahun 2024 menurun menjadi 0,38 dari sebelumnya 0,39 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat fluktuatif dan masih tinggi.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (64,45 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (34,90 persen). Kemudian pada Tahun 2024 kontribusi pertumbuhan ekonomi masih didukung pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 64,14 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 35,41 persen. Dilihat dari perubahannya menunjukkan adanya penurunan kontribusi konsumsi rumah tangga, namun terjadi kenaikan pada pembentukan modal tetap bruto. Dapat dikatakan bahwa kondisi investasi Kabupaten Banyumas mengalami perbaikan walaupun dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan. Meskipun melambat namun relatif cukup kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi. Pada tahun 2024, 11,95% penduduk Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,17% dari 6,35% menjadi 6,18%. TPT Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78% dan nasional sebesar 4,91%. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran berjalan lambat karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan

oleh masyarakat. Investasi yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Banyumas. Selain itu, isu perlindungan sosial yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas program-program yang ada, sehingga perlindungan sosial yang memadai dan tepat sasaran diperlukan untuk mendukung masyarakat rentan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan kondisi kinerja perekonomian yang ada, bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Banyumas masih cukup rendah dan belum inklusif. Perekonomian daerah yang terus tumbuh belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, dan belum mampu mengurangi kemiskinan serta ketimpangan secara signifikan. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara ketimpangan cenderung meningkat. Penanganan kemiskinan maupun pengangguran belum menunjukkan hasil yang signifikan, karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja, dan peluang usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Banyumas.

Atas dasar tersebut, dengan memperhatikan tren perkembangan perekonomian global, nasional dan daerah, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Banyumas serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi

Jawa Tengah tahun 2026 maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas di tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 6,10 – 6,50 persen dan diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB dan PDRB per kapita.

Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 diarahkan pada *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*, dengan prioritas sebagai berikut:

Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026

Tabel 1 Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
1.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif	a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); b. Penanganan Anak Tidak Sekolah; c. Peningkatan Akses Pendidikan untuk semua dengan perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan penyediaan layanan transportasi sekolah gratis; d. Pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan; e. Peningkatan Kualitas dan distribusi Guru dan Tenaga Kenilai, dengan peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan;

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		f. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); g. Peningkatan kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD, dan SMP; h. Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan; Pembangunan RS Tipe C dengan unggulan Paru i. Pemeriksaan Kesehatan Gratis j. Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap; k. Pemenuhan SPM Kesehatan; l. Penurunan Angka Kesakitan penyakit menular (khususnya Prevalensi TB, DBD dan HIV) dan penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Jantung, Kanker, Stroke, Gagal Ginjal); m. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, melalui Pembangunan dan renovasi Puskesmas di wilayah terpencil dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan; n. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, terutama Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB); serta Pencegahan dan Penurunan Prevalensi <i>stunting</i>; o. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan; p. Pengembangan Layanan Sanitasi dan Air Bersih; q. Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin.
2.	Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga, dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul	a. Inventarisasi seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; b. Pengkajian objek pemajuan kebudayaan (seperti dialek Banyumasan, Bahasa Ngapak,

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		kesenian Banyumas atau cerita rakyat Banyumasan); c. Internalisasi budaya Banyumas melalui penerapan Bahasa daerah banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada waktu tertentu, memasukkan pendidikan objek pemajuan kebudayaan (muatan lokal) ke dalam kurikulum sekolah, penerapan pakaian adat banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada hari tertentu, pengadaan pementasan dan perlombaan kesenian banyumasan secara berkala, serta Pengenalan Budaya Banyumas melalui “Budaya Masuk Sekolah” secara <i>mobile</i>, baik seni musik, seni tari, maupun wayang; d. Peningkatan pengembangan unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (kualitas perpustakaan ber-SNP, koleksi buku bacaan, sarana prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, layanan perpustakaan, dll); e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan, serta kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; f. Fasilitasi pegiat olahraga dengan penyelenggaraan <i>event</i> olahraga, pembinaan dan penyediaan fasilitas pendukung olahraga.
3.	Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan	a. Pengendalian angka kelahiran sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk; b. Pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif bagi masyarakat rentan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
	perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda	c. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan berbagai bidang serta pemberdayaan perempuan dalam kemandirian ekonomi; d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi, olahraga, dan wirausaha; e. Peningkatan kemampuan pemuda untuk berprestasi khususnya di bidang olahraga.
4.	Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi	a. Sertifikasi SDM kepariwisataan di Desa Wisata dan Sertifikasi pelaku ekonomi kreatif; b. Pelatihan BUMDes untuk mendukung sektor usaha pertanian berbasis komoditas unggulan Desa, Desa Wisata, dan Ekonomi Kreatif di tingkat Desa; c. Pelatihan tenaga kerja/ wirausaha berbasis potensi wilayah/ komoditas unggulan kecamatan; d. Penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan klaster ekonomi kreatif dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif; e. Peningkatan kapasitas Petani, melalui pelatihan petani, peternak, dan pebudidaya bagi generasi Z dan milenial, pelatihan teknologi pertanian modern dan manajemen usaha tani, penguatan kelompok tani dan koperasi sebagai wadah kolaborasi, serta fasilitasi akses ke pasar dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan lokal; f. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk koperasi dan UMKM atau pemuda pelopor UMKM, fasilitasi akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		keuangan, dan pengembangan pasar digital bagi produk UMKM lokal; g. Peningkatan minat pemuda di sektor pertanian melalui kemitraan pengembangan petani milenial serta mendorong keterlibatan pemuda dalam kelembagaan pertanian; h. Peningkatan literasi digital pelaku ekonomi; i. Evaluasi dan monitoring Kinerja BUMD.
5.	Penguatan implementasi regulasi yang hijau dan adaptif	a. Fasilitasi pengelolaan transportasi masal dan distribusi untuk produk lokal mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan; b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien; c. Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan; d. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; e. Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan; f. Penerapan kebijakan pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
6.	Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung	a. Pelaksanaan kajian produk potensial Kabupaten Banyumas; b. Penetapan Indikasi Geografis produk unggulan seperti Durian Bawor atau Kopi Gunung Slamet;

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		c. Pengembangan produk High Value Crop seperti Melon Golden Aroma, Alpukat, Durian, dan Kopi; d. Penguatan kurikulum inkubator bisnis; e. Peningkatan promosi produk UMKM dan Koperasi dengan kerjasama kemitraan dengan swasta; f. Pembuatan city branding guna mendukung promosi produk lokal dan pariwisata; g. Penggalan potensi kebudayaan sebagai daya tarik wisata baru; h. Peningkatan promosi wisata; i. Peningkatan promosi investasi berbahan baku produk komoditas lokal; j. Peningkatan kelas Pasar lewat rehabilitasi pasar dan peningkatan sarpras pasar; k. Peningkatan sarpras pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya; l. Fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM; m. Pengembangan kawasan berbasis komoditas pertanian unggulan di tiap kecamatan seperti pisang, kelapa, cabai, kambing, dan ikan budidaya; n. Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) baru di Kabupaten Banyumas; o. Pembuatan ekosistem Ekraf Subsektor Seni Pertunjukan, kuliner, dan kriya; p. Pengaktifan kembali kawasan minapolitan; q. Penyiapan kebijakan dan perencanaan pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri,

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		serta pembangunan kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis.
7.	Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi	a. <i>Updating</i> data kemiskinan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan; b. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; c. Penanganan kemiskinan dengan satu data kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi; d. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan air bersih; e. Pengembangan kebijakan penanganan kemiskinan yang bersinergi dengan berbagai <i>stakeholder</i> ; f. Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.
8.	Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan dan penyediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha; b. Peningkatan informasi ketenagakerjaan sampai ke wilayah perdesaan; c. Peningkatan program kerjasama dengan dunia usaha; d. Meningkatkan investasi untuk penyerapan tenaga kerja; e. Penyelenggaraan sertifikasi pelatihan tenaga kerja.
9.	Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi	a. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan; b. Peningkatan produktivitas pangan melalui pengembangan pertanian

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
	dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal	organik, pemanfaatan teknologi dan efisiensi usaha tani; c. Diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan; d. <i>Upskilling</i> SDM pertanian, peternakan, dan perikanan dalam memproduksi pangan; e. Menjaga stok dan harga pangan; f. Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan); g. Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal; h. Peningkatan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah; i. Penyediaan sarana prasarana pertanian antara lain benih unggul dan bibit berkualitas yang sesuai dengan kondisi lokal, pemberdayaan teknologi pertanian modern (seperti alat pertanian, sistem irigasi tetes, dan aplikasi digital untuk monitoring cuaca dan pasar), pemanfaatan lahan tidur atau lahan marginal untuk produksi pangan dengan memberikan insentif kepada petani, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan produksi pertanian (padi, cabe, singkong, kelapa genjah) untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan <i>stunting</i>;

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		j. Pengolahan dan pemasaran produk pangan, melalui pengembangan industri pengolahan pangan lokal, diversifikasi produk pertanian (contoh : Mocaf), pemasaran dan <i>branding</i> produk lokal, serta pengembangan pasar komoditas tani.
10.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan	a. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penunjang akses/konektivitas antar wilayah, akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah marginal; b. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan di wilayah perdesaan; c. Peningkatan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar desa dan kota, meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemenuhan pelayanan air siap minum dan sanitasi aman, pengelolaan air limbah ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang terpadu, rumah layak huni dan pengembangan fasilitas sistem sanitasi terpadu yang memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal; d. Pengembangan infrastruktur transportasi berbasis lingkungan dengan pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah lingkungan, layanan transportasi umum berbasis energi bersih, dan pengembangan infrastruktur transportasi masal; e. Pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian, pariwisata, dan pelestarian pemajuan kebudayaan; f. Pengembangan kawasan perumahan yang berkualitas,

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		ramah lingkungan dan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; g. Peningkatan infrastruktur digital dengan pengembangan jaringan internet pada ruang publik untuk mendukung perekonomian dan pendidikan; h. Pengembangan restorasi dan konservasi infrastruktur alam dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di sepanjang jalan; i. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan; j. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh perkotaan; k. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.); l. Penyiapan instrumen pendukung pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri, serta kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya; m. Pembangunan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan mempertimbangkan penataan ruang yang berkualitas,

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan reforma agraria; n. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan; o. Pengelolaan lingkungan perdesaan berbasis pencegahan krisis iklim, ketahanan berencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan; p. Peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan potensi desa, pengembangan kawasan perdesaan serta peningkatan kapasitas, penguatan peran dan pembagian kewenangan pemerintahan desa tersinkronisasi dengan perencanaan daerah; q. Penyediaan infrastruktur jalan menuju sentra ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan pemeliharaan irigasi, pengembangan gudang penyimpanan pangan/ revitalisasi lumbung pangan, dan pengembangan akses jalan ke lahan pertanian, serta revitalisasi atau peningkatan infrastruktur dan tata kelola pasar tradisional/ pasar desa agar lebih nyaman dan aman serta promosi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal melalui kampanye digital dan <i>offline</i>; r. Pengembangan jaringan internet di kawasan perdesaan untuk mendukung ekonomi digital; s. Peningkatan jalan mendukung konektivitas dari kabupaten lain ke

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		kawasan pariwisata atau antar destinasi wisata t. Penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien.
11.	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi	a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintahan, pengembangan portal keterbukaan informasi publik dan Optimalisasi sistem pelaporan <i>online</i>; b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik, penguatan implementasi <i>e-government</i>, serta evaluasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan; c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di kantor-kantor pelayanan publik seperti kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, pengembangan sistem antrean <i>online</i> untuk layanan publik sehingga masyarakat dapat mengatur waktu dengan lebih efektif, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk menilai kualitas layanan dan mengidentifikasi permasalahan yang harus segera ditangani; d. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah melalui pelatihan dan <i>workshop</i> bagi PNS dalam bidang manajemen publik, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi aparatur untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian mereka; e. Digitalisasi Layanan Publik melalui implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan-layanan pemerintah, serta pengembangan

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		aplikasi layanan publik berbasis <i>mobile</i>; f. Peningkatan promosi investasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif bagi investor, serta memperbanyak penyelenggaraan event-event promosi investasi untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan menarik investor nasional dan internasional; g. Peningkatan akses Layanan Publik secara merata, melalui peningkatan akses internet dan infrastruktur komunikasi di daerah <i>blank spot</i>, pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta penguatan pusat layanan publik terpadu di setiap kecamatan yang mampu menangani berbagai kebutuhan masyarakat secara efisien.
12.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan	a. Peningkatan pengelolaan limbah dan sampah terintegrasi menuju <i>Zero Waste to Landfill</i> di seluruh wilayah serta peningkatan peran masyarakat; b. Pengelolaan air bersih dan sanitasi; c. Peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas luasan tanah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau; pengelolaan lahan berkelanjutan, pemantauan kualitas udara dan kualitas air, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku; peningkatan kerjasama pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; d. Penyusunan dan implementasi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan serta peningkatan aksi

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; e. Peningkatan advokasi dan edukasi perlindungan dan pengelolaan LH; f. Peningkatan kapasitas daerah terhadap mitigasi dan penganggulangan bencana; g. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; h. Pengelolaan risiko bencana mulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, pembangunan sistem peringatan dini bencana, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana; i. Pengkajian risiko dan penyusunan program penanggulangan bencana; j. Pengembangan logistik kebencanaan; k. Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat; l. Peningkatan konservasi dan penerapan kebijakan meminimalkan limpasan air ke badan air dari area terbangun; m. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; n. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung,

No	Prioritas Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2026	Fokus
		daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana; o. Peningkatan tata kelola sumber daya air untuk menjaga daya dukung air.

Sumber: RKPD Banyumas 2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan adanya dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah mempedomani kebijakan yang telah

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 secara umum digunakan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan tahun 2026 dimana Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah.

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2026, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Asumsi Ekonomi Makro APBN 2026

No.	Indikator Ekonomi Makro	Tingkat %
1	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44-4,96 %
3	Indeks Modal Manusia	0,57
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,8 %
5	Inflasi	1,5-3,5 %
6	Nilai Tukar	16.500 – 16.900 (Rp/USD)
7	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Th	6,6-7,2 %
8	Harga Minyak Mentah Indonesia	60-80 USD/Barel
9	Lifting Minyak Mentah	600-605 (ribu barel/hari)
10	Lifting Gas Bumi	953-1017 (ribu barel setara minyak/hari)

Sumber: KEM PPKF 2026

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026 dengan tema **“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial**

Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan mempertimbangkan kondisi proyek perekonomian daerah Tahun 2026, antara lain sebagai berikut :

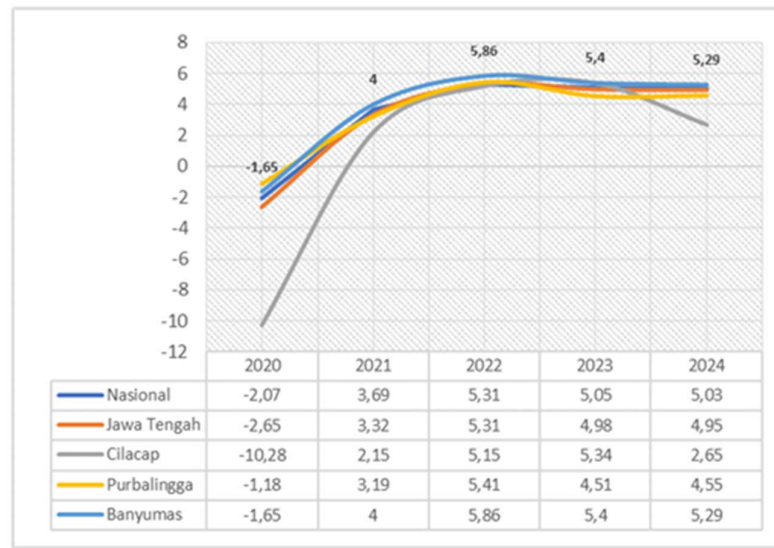
Tabel 3 Asumsi Ekonomi Makro APBD 2026

No.	Indikator	Target Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,88-6,50 %
2	PDRB ADHB	75.638.509,3 juta Rp
3	PDRB Perkapita ADHB	40,97-45,25 juta Rp pkpt
4	Inflasi	1-3 %
5	Nilai Investasi Daerah	1.400 Miliar Rp
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94-5,75 %
7	Angka Kemiskinan	10,84 – 9,50 %
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76%

Sumber: RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banyumas semakin membaik, dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Sempat mengalami kontraksi hingga -1,65% pada tahun 2020, perekonomian Banyumas beranjak pulih dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3% dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah 5,29%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan 5,03% dan Provinsi Jawa Tengah dengan 4,95%. Lebih lanjut, Laju Pertumbuhan Ekonomi Banyumas konsisten tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten Cilacap dan Purbalingga sejak tahun 2020. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Gambar 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas
dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Banyumas adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Nasional, Jawa Tengah, Cilacap, dan Purbalingga, Ekonomi Banyumas di tahun 2024 tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan negatif dari Sektor Pertanian pada 2024 dengan nilai -0,54%. Pelambatan di sektor pertanian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) pergeseran musim tanam padi yang baru dilaksanakan akhir tahun 2024 sehingga panen padi baru akan dilaksanakan di tahun 2025, (2) terjadi pergeseran waktu panen buah-buahan khususnya durian yang biasanya panen pada bulan Oktober-November bergeser ke awal tahun 2025, (3) terjadi penurunan produksi tanaman pangan utama akibat dari serangan hama dan kekeringan. Pertumbuhan negatif dari sektor pertanian tersebut berdampak nyata ke pertumbuhan ekonomi Banyumas dikarenakan *share* sektor ini ke total PDRB Banyumas mencapai

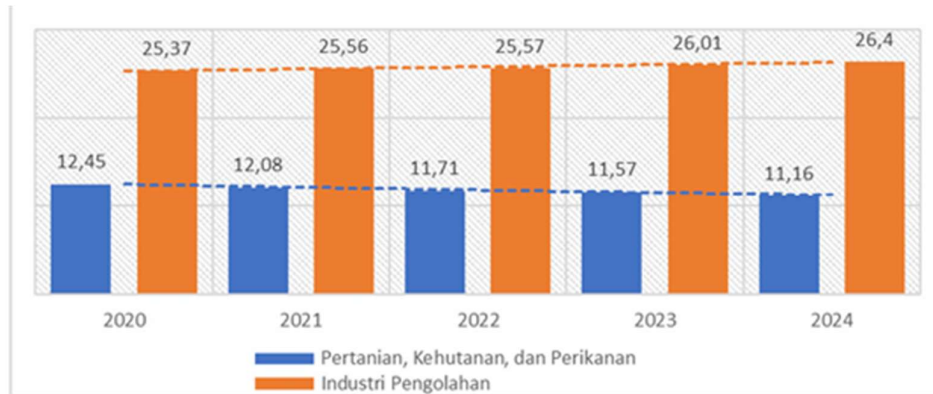
11,16% atau peringkat 4 setelah industri pengolahan (26,40%), perdagangan (14,98%) dan konstruksi (13,26%).

3.2.2. PDRB ADHB

Sektor lapangan usaha memegang peran krusial dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai indikator utama kesejahteraan dan aktivitas ekonomi, PDRB menggambarkan kontribusi berbagai sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah.

Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Banyumas telah mengalami pergeseran. Kontribusi (*share*) sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan hingga menggeser kontribusi (*share*) sektor pertanian. Pada tahun 2024, *share* PDRB ADHB Sektor Industri mencapai 25,37%, sementara *share* PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun hingga 12,45%.

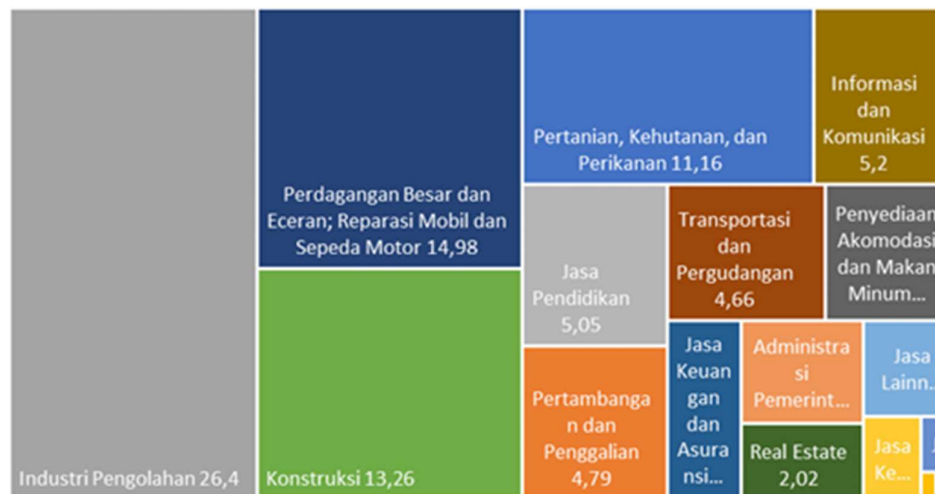
Pada tahun 2024, nilai PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas meningkat hingga mencapai Rp19 Triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi ADHK mencapai 5,05. Sementara itu nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mencapai Rp 8 Triliun dan mengalami penurunan hingga -0,54%. Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan yang terkecil dibandingkan 16 sektor lapangan usaha lainnya. Berikut grafik pergerakan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 2
Kontribusi (*Share*) PDRB Sektor Industri dan Pertanian
Tahun 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

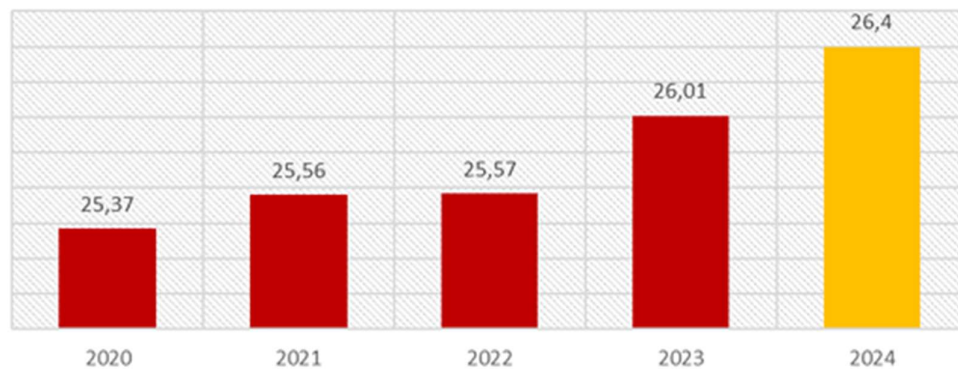
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku terdistribusi ke 17 sektor lapangan usaha. *Share* PDRB yang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan, disusul Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Konstruksi, dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Berikut *share* Sektor PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 3
Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

Dalam 5 tahun terakhir *share* PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyumas merupakan yang terbesar dan selalu diatas 20%. Pada 2020 industri pengolahan memiliki *share* sebesar 25,37% dan menjadi 26,4% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Banyumas didominasi oleh industri kecil sebanyak 44.096 unit atau 99% dari total jumlah industri di Kabupaten Banyumas 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 4
Share PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas
Tahun 2022-2024 (ADHB)

Sementara itu, *share* PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum konsisten meningkat dalam lima tahun terakhir. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor potensial yang dapat mendukung banyak sektor lainnya. Pada 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2020 memiliki *share* sebesar 3,11% dan meningkat kontribusinya hingga 3,62%. Banyaknya investasi di sektor ini menjadi faktor pendukung konsistennya peningkatan dalam lima tahun terakhir.

3.2.3. PDRB Perkapita ADHB

Seiring dengan peningkatan ekonomi daerah, nilai PDRB per kapita terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2024. Pada

tahun 2024, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp 40,30 juta. Peningkatan ini menggambarkan bahwa pendapatan rata rata masyarakat Banyumas dalam satu tahun mencapai Rp 40,30 juta per tahunnya atau sekitar Rp 3,35 juta per bulannya. Rincian perkembangan PDRB Perkapita ADHB 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

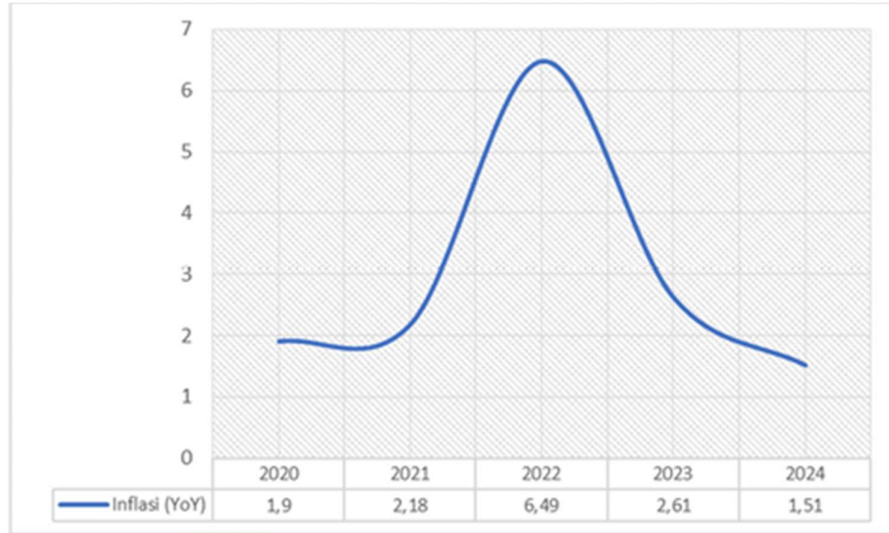


Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2025, diolah

Gambar 5
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Per Kapita
Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

3.2.4. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga barang/jasa secara konstan dan terus menerus, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga pada beberapa komoditas pangan strategis seperti beras dan telur ayam ras serta transportasi. Permintaan masyarakat yang tinggi mengakibatkan ketidakstabilan harga di pasar. Tingginya permintaan menyebabkan tinggi harga di pasar dan mendorong inflasi semakin tinggi. Tingkat inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2024 inflasi Kabupaten Banyumas sebesar 1,51% lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2,61%. Inflasi Kabupaten Banyumas (%) Tahun 2020–2024 disajikan dalam gambar berikut:

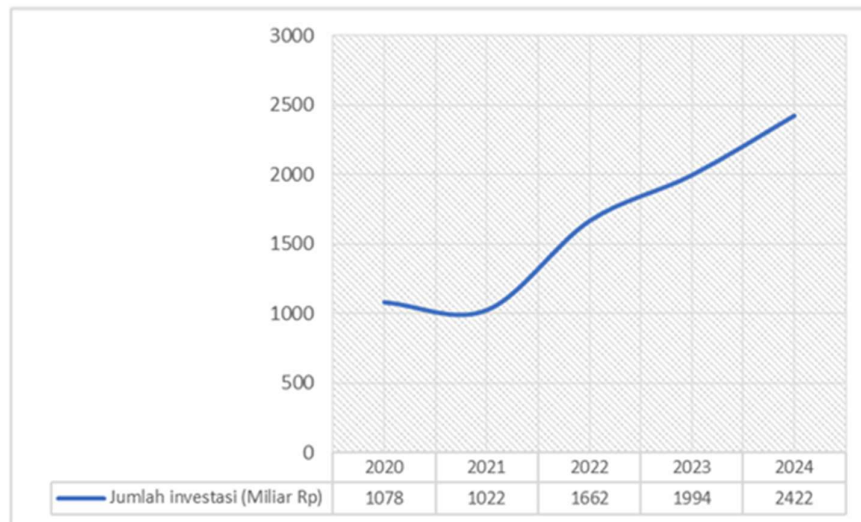


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 6
Inflasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (%)

3.2.5. Nilai Investasi Daerah

Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Meskipun pada tahun 2021 sempat terjadi penurunan, jumlah investasi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan, dengan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas tahun 2024 mencapai Rp 2.422.403.385.910 yang berasal dari kontribusi penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan usaha mikro kecil. Lebih lanjut, kontribusi investasi Penanaman modal terbesar dari Penanaman modal dalam negeri.



Sumber : DPMPSTP Kabupaten Banyumas, 2024

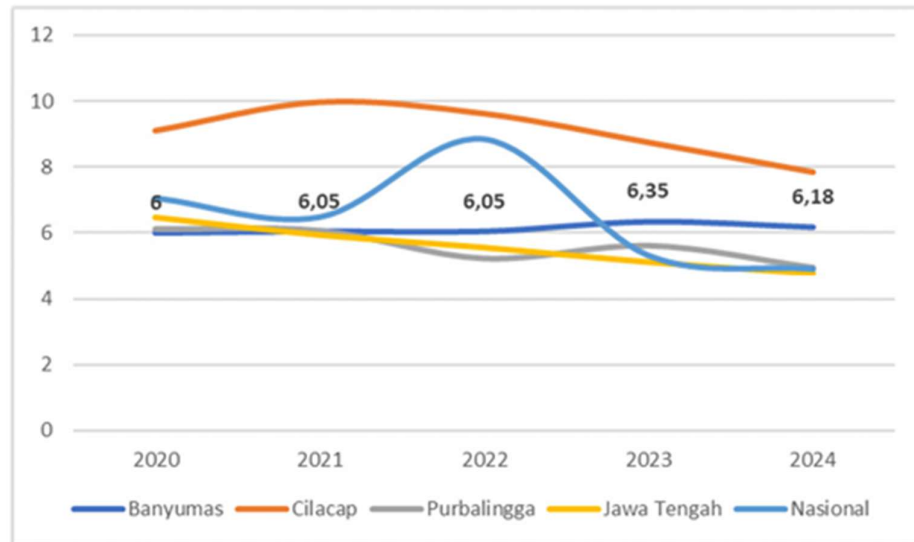
Gambar 7
Jumlah Investasi Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

3.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dinamika ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TPT Kabupaten Banyumas terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun pada tahun 2024, TPT Kabupaten Banyumas mengalami penurunan menjadi 6,18%. Namun meski mengalami penurunan, TPT Banyumas masih lebih tinggi dari Nasional dengan 4,91% dan Jawa Tengah dengan 4,78%. Penurunan ini terjadi karena optimalnya *Job Matching* yang dilakukan pada tahun berjalan. Selain itu, penyelenggaraan *Job Fair* juga membuka komunikasi efektif antara pencari kerja dan penyedia kerja sehingga berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun tersebut. Berdasarkan data dari DinnakerkopUKM, jumlah lowongan yang terdaftar mencapai 18.983 lowongan, dan terisi 17.112 lowongan.

Meski TPT menurun pada 2024, perlu adanya pembukaan lapangan kerja baru mengingat pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya. Beberapa sektor potensial sebagai

penyedia lapangan kerja baru adalah ekonomi kreatif, ekonomi hijau, serta sektor pertanian seperti budidaya perikanan, peternakan, dan produk *high value crop* seperti tanaman hortikultura.

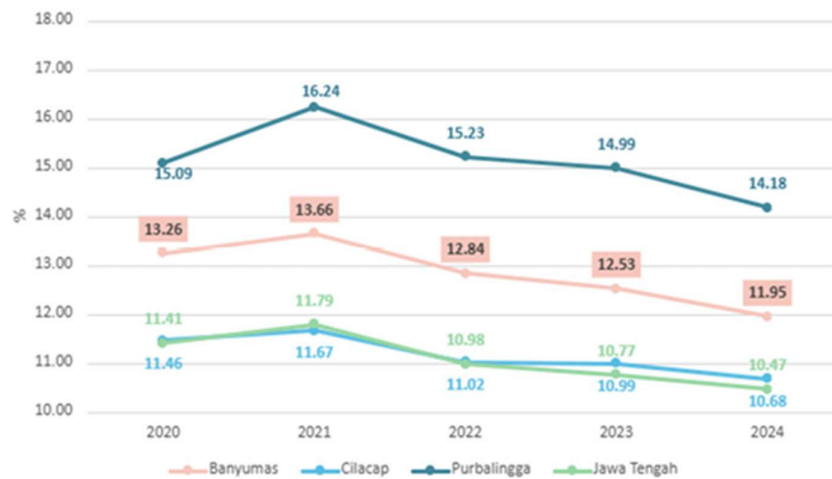


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 (%)

3.2.7. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menurun sebesar 0,58% dari 12,53% pada tahun 2023 menjadi 11,95% di tahun 2024. Perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Kemiskinan ekstrem juga masih menjadi masalah besar yang belum dapat diatasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Banyumas telah dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, program bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, penyediaan rumah layak huni (RTLH), serta pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih telah dilaksanakan. Kedua, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan juga telah dilaksanakan. Ketiga, dalam upaya meminimalkan kantong kemiskinan, kebijakan pemetaan dan

intervensi program difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

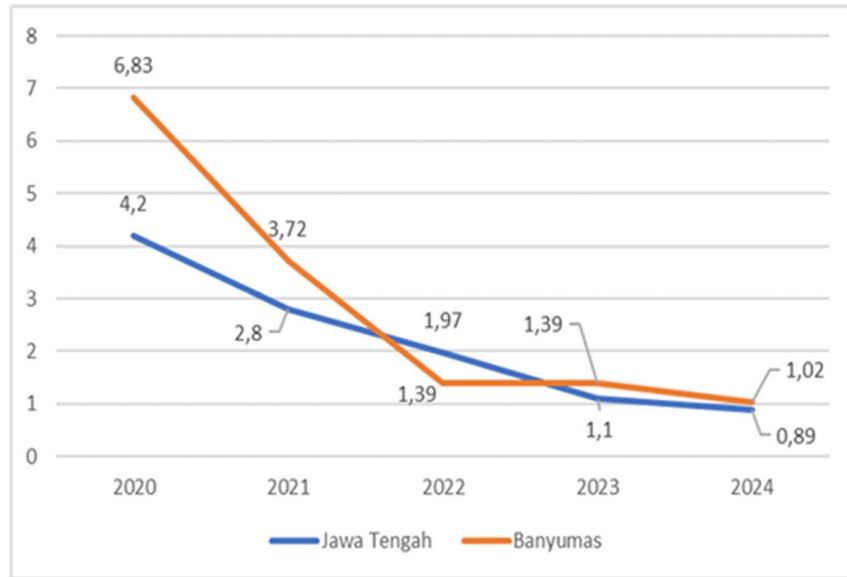
Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas adalah belum meratanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya layanan sanitasi dan rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2024 oleh dinsospermasdes Kabupaten Banyumas kebutuhan RTLH sebanyak 15.603 unit, dan kebutuhan Sanitasi sebesar 18.099 unit serta kebutuhan air bersih sebesar 18.712 satuan sambungan rumah. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat miskin dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan. Selain itu, belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat miskin juga menjadi kendala dalam mendorong kemandirian ekonomi, sehingga banyak kelompok rentan masih bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Masalah lain yang memperparah kondisi ini adalah masih adanya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam pendataan kemiskinan yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Kemenko PMK semakin memperumit upaya intervensi, karena terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Akibatnya, hanya sekitar 60% penerima bantuan yang benar-benar tepat sasaran, sementara 40% lainnya masih belum terjangkau bantuan sosial yang seharusnya. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan. Hal ini terlihat dari nilai RB tematik kemiskinan tahun 2024 untuk capaian dampak masih rendah dengan nilai 1 dari total bobot 3, dikarenakan koordinasi yang

kurang terintegrasi menghambat efektivitas program dan distribusi sumber daya.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas mencapai 6,83%. Namun, berkat berbagai intervensi, angka ini turun drastis menjadi 1,02 % pada tahun 2024. Namun, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama, yaitu sebesar 0,89%

Penurunan kemiskinan ekstrem di Banyumas didorong oleh program-program seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih dan listrik, pembangunan jamban, serta penanganan stunting. Selain itu, program untuk mengatasi anak tidak sekolah (ATS), dukungan bagi penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak bekerja juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2023 dan 2024, implementasi program pendampingan "Satu OPD Satu Desa Dampingan" di desa prioritas ekstrem juga berkontribusi signifikan dalam memastikan bantuan dan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMD, Baznas, dan alokasi APBD Kabupaten, turut memperkuat upaya penurunan kemiskinan ekstrem ini.



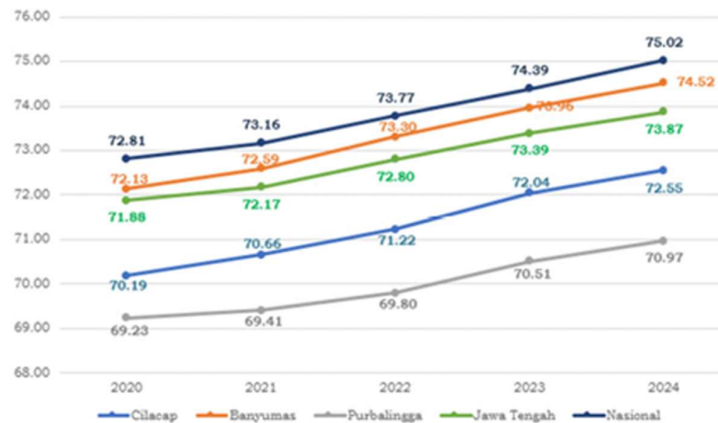
Sumber : BPS, 2024

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

3.2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, dengan komponen pembentuk yaitu kualitas pendidikan, kualitas Kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat. IPM di Kabupaten Banyumas berdasarkan metode baru perhitungan Angka Harapan Hidup *Long Form* SP2020 periode 2020-2024 terus meningkat seiring meningkatnya nilai-nilai komponen pembentuknya. Pada tahun 2024 nilai IPM Kabupaten Banyumas sebesar 74,52 menempatkan Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) berdasarkan klasifikasi UNDP (*United Nations Development Program*). IPM masih menjadi sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan IPM menjadi kategori “Sangat Tinggi” (IPM lebih dari 80).

Nilai IPM Kabupaten Banyumas cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di Wilayah Cibalingmas dan Provinsi Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 11
IPM Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 Metode Baru Hasil Perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat, pada tahun 2022 mencapai Rp.3,43 triliun, tahun 2023 mencapai Rp.3,50 triliun dan tahun 2024 mencapai Rp.3,80 triliun. Peningkatan tersebut akibat dari meningkatnya pendapatan yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut tabel Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2024:

**Tabel 4 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2022-2024**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	822.685.992.142	854.942.206.458	903.571.683.035
1.1.1.	Pajak Daerah	267.236.064.377	297.081.716.066	323.426.130.549
1.2.2.	Retribusi Daerah	26.130.786.681	27.357.075.743	524.647.625.309
1.3.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.801.615.649	26.861.536.807	28.191.432.745
1.4.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	507.517.525.435	503.641.877.842	27.306.494.432
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.589.697.751.952	2.632.443.641.584	2.876.611.922.393
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.314.527.536.417	2.343.242.969.975	2.586.742.016.886
1.2.1.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Daa Perimbangan	1.912.726.855.537	1.988.550.751.975	2.207.364.617.886
1.2.1.1.1.	Bagi Hasil Pajak	51.280.979.747	49.669.105.653	42.430.251.000
1.2.1.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	3.574.498.957	2.395.891.942	7.866.113.000
1.2.1.1.2.1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.280.141.707.164	1.352.843.702.304	1.461.885.991.064
1.2.1.1.3.	Dana Alokai Khusus (DAK)	577.729.669.669	583.642.052.076	695.182.262.822
1.2.1.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	401.800.680.880	354.692.218.000	379.377.399.000
1.2.1.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Penyesuaian	30.603.775.000	-	20.771.888.000
1.2.1.2.2.	Dana Desa	371.196.905.880	354.692.218.000	358.605.511.000
1.2.2.	Transfer Pemerintah Provinsi	275.170.215.535	289.200.671.609	289.869.905.507
1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	253.570.782.196	259.758.223.214	268.279.615.582
1.2.2.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan	21.599.433.339	29.442.448.395	21.590.289.925
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.024.437.570	11.028.512.968	13.486.471.156
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.024.437.570	10.997.012.968	13.411.593.892
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	31.500.000	74.877.264

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya			
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.426.408.181.664	3.498.414.361.010	3.793.670.076.584

Sumber: LRA APBD Kabupaten Banyumas 2022-2024 (Audited)



Gambar 12
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK dan Badan Usaha lainnya;
- c. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- e. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi;
- f. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- g. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- h. Optimalisasi revitalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

Gejolak perekonomian global dengan ketidakpastian yang tinggi menimbulkan risiko yang berdampak pada pendapatan daerah. Berdasarkan perkembangan terakhir, beberapa risiko yang diidentifikasi antara lain adalah fluktuasi harga komoditas, depresiasi nilai tukar, tekanan inflasi, serta potensi perlambatan ekonomi lebih lanjut yang dapat menurunkan basis pajak dan mempengaruhi realisasi penerimaan daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2026

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENDAPATAN DAERAH		
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.165.627.706.267,00	1.200.000.000.000,00
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	538.655.855.427,00	520.224.100.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	544.188.550.457,00	594.775.900.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.326.114.383,00	31.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.457.186.000,00	54.000.000.000,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.739.523.620.000,00	2.823.341.600.000,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.563.232.066.000,00	2.625.218.300.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.291.554.000,00	198.123.300.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	5.272.100.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0	5.272.100.000,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.905.151.326.267,00	4.028.613.700.000,00

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2022-2024 fluktuatif. Tahun 2022 besarnya belanja daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.3,60 triliun, menurun pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp.3,50 triliun dan meningkat kembali menjadi sebesar Rp.3,90 triliun pada tahun 2024.

Realisasi belanja dan transfer masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan tingkat serapan rendah seperti masih terdapatnya permasalahan dalam *cleansing* data penerima bantuan sosial agar tidak tumpang tindih, masih kurangnya peminat belanja subsidi karena persyaratan yang ketat dan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan telah dilakukan seperti pembaruan data dan pelaksanaan verifikasi faktual data penerima bantuan, melakukan pendampingan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BELANJA DAERAH			
1.1.	BELANJA OPERASI	2.444.173.455.628	2.598.651.397.113	2.882.565.389.582
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.451.366.997.587	1.464.100.711.140	1.667.238.715.369
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.365.360.138	974.286.624.864	993.023.708.364

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.	Belanja Bunga	9.322.835.019	10.596.297.674	8.679.104.156
1.1.4.	Belanja Subsidi	-		-
1.1.5.	Belanja Hibah	78.073.991.484	137.398.940.885	187.837.855.193
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	9.044.271.400	12.268.822.550	25.786.006.500
1.2.	BELANJA MODAL	479.036.065.598	333.503.478.957	436.935.317.516
1.2.1.	Belanja Tanah	2.307.762.514	10.676.091.994	6.966.278.344
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	122.539.063.761	111.619.559.928	145.091.425.612
1.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	222.410.863.132	123.384.913.772	161.221.013.495
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.808.411.347	69.951.712.780	105.612.432.334
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.281.964.844	16.047.110.483	18.029.467.731
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	1.688.000.000	1.824.090.000	14.700.000
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.163.884.848	307.894.469	456.199.095
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	28.163.884.848	307.894.469	456.199.095
1.4.	BELANJA TRANSFER	649.473.961.099	568.366.050.501	585.288.328.683
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	32.032.638.219	28.030.683.366	33.770.547.807
1.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	29.582.380.341	25.346.214.987	31.034.171.413
1.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	2.450.257.878	2.684.468.379	2.736.376.394
1.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	
1.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	617.441.322.880	540.335.367.135	551.517.780.876
1.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
1.4.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	617.441.322.880	540.335.367.135	551.517.780.876
1.4.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	
1.4.2.4.	Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.600.847.367.173	3.500.828.821.040	3.905.245.234.876

Sumber: LRA APBD Kabupaten Banyumas 2022-2024 (Audited)



Gambar 13
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024

Pada awal 2025, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja ini bertujuan untuk mendorong efisiensi belanja operasional dan merekonstruksi agar belanja lebih produktif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.4,02 triliun, meningkat sebesar Rp.132,8 miliar (0,03 persen) bila dibandingkan pada APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.3,88 triliun. Belanja daerah tersebut diarahkan pada tema *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”* dengan fokus utama yang telah diselaraskan dengan prioritas Pemerintah, sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;
3. Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di Kabupaten Banyumas;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2024-2026;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja wajib sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20 persen fungsi pendidikan, 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik, 30 persen belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dan belanja wajib yang didanai dari pajak daerah;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
8. Upaya mengkomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan desa dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas

pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

10. Upaya pemenuhan target untuk Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Risiko terkait belanja daerah yang perlu dikendalikan adalah pola belanja daerah yang bersifat lambat di awal tahun, yang dapat menimbulkan risiko inefisiensi belanja. Strategi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko implementasi belanja daerah antara lain; (i) harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas Pemerintah; (ii) penyaluran transfer berbasis kinerja diterapkan dengan menekankan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan dan pelaporan dana; serta (iii) pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer difokuskan pada *output* dan *outcome* untuk memastikan efektivitasnya.

Selain itu, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik menjadi langkah penting dalam optimalisasi penggunaan dana. Upaya perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah terus didorong, termasuk menyeimbangkan belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan belanja daerah dapat lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

5.2 Target Belanja Daerah

Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja dan Transfer Tahun 2026, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7 Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Tahun 2026

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BELANJA DAERAH		
1.1.	BELANJA OPERASI	3.022.400.406.398,89	3.090.467.990.126,00
1.1.1.	Belanja Pegawai	1.863.122.059.650,88	1.965.892.001.578,80
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.398.175.979,01	1.037.310.248.147,20
1.1.3.	Belanja Bunga	4.772.414.550,00	4.900.000.000,00
1.1.4.	Belanja Subsidi	98.000.000,00	39.000.000,00
1.1.5.	Belanja Hibah	110.084.770.419,00	66.182.429.500,00
1.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	13.924.985.800,00	16.144.310.900,00
1.2.	BELANJA MODAL	376.218.580.155,11	356.254.698.117,00
1.2.1.	Belanja Tanah	4.235.000.000,00	1.000.000.000,00
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	114.209.343.989,00	106.648.836.926,00
1.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	133.474.261.666,00	134.156.840.612,00
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.667.471.500,11	95.709.183.500,00
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	34.602.503.000,00	18.709.837.079,00
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00
1.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000
1.4.	BELANJA TRANSFER	605.018.583.076,00	643.277.311.757,00
1.4.1.	Transfer Bagi Hasil	57.424.575.978,00	44.234.414.457,00
1.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	547.594.007.098,00	599.042.897.300,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.013.637.569.630,00	4.100.000.000.000,00

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Terkait Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.691.123.266	293.384.971.357	275.887.301.164
1.1.1.	Penggunaan SILPA	369.896.692.236	262.505.937.757	246.766.334.764
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	30.879.033.600	29.120.966.400
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	116.794.431.030	-	
1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		486.691.123.266	293.384.971.357	275.887.301.164
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.746.000.000	44.204.176.563	61.790.015.820
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	-	-	
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	15.000.000.000	
2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	24.746.000.000	18.510.784.000	
2.4.	Pemberian Pinjaman Dearah	-	10.693.392.563	61.790.015.820
2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		49.746.000.000	44.204.176.563	61.790.015.820
PEMBIAYAAN NETO		436.945.123.266	249.180.794.794	214.097.285.344

Sumber: LRA APBD Kabupaten Banyumas 2022-2024 (Audited)



Gambar 14
Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan

pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran pokok hutang.

Risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal pembiayaan utang/pinjaman daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban pembayaran kembali (gagal bayar). Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang tidak optimal. Likuiditas dan solvabilitas yang terkendala akan menyebabkan penyelesaian tagihan (*outstanding*) pembiayaan utang daerah (pinjaman daerah) terhambat sehingga terdapat potensi risiko terkait dana jaminan penugasan. Strategi mitigasi risiko pembiayaan utang daerah mencakup penguatan penilaian untuk persetujuan utang secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pembayaran pokok dan bunga.

6.2 Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9 Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
1.1.1.	Penggunaan SILPA	187.448.673.733,00	154.228.800.000,00
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
1.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		187.448.673.733,00	154.228.800.000,00
1.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
1.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	-	20.000.000.000
1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.600.000.000,00	16.500.000.000
1.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	66.362.430.370,00	46.342.500.000
1.2.4.	Pemberian Pinjaman Dearah	-	-
1.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		78.962.430.370,00	82.842.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		108.486.243.363,00	71.386.300.000,00

Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000.000,00
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	520.224.100.000,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	594.775.900.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.000.000.000,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.823.341.600.000,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.625.218.300.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	198.123.300.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.272.100.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.272.100.000,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		4.028.613.700.000,00
2	BELANJA DAERAH	

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
2.1.	BELANJA OPERASI	3.090.467.990.126,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.965.892.001.578,80
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.310.248.147,20
2.1.3.	Belanja Bunga	4.900.000.000,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	39.000.000,00
2.1.5.	Belanja Hibah	66.182.429.500,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	16.144.310.900,00
2.2.	BELANJA MODAL	356.254.698.117,00
2.2.1.	Belanja Tanah	1.000.000.000,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	106.648.836.926,00
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	134.156.840.612,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.709.183.500,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.709.837.079,00
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	30.000.000,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	643.277.311.757,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	44.234.414.457,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	599.042.897.300,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.100.000.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT		-71.386.300.000,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3.1.1.	Penggunaan SILPA	154.228.800.000,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		154.228.800.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.342.500.000
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		82.842.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		71.386.300.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 yang tercantum di dalam KEM PPKF 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan *prudent*.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, Pemerintah Daerah harus menetapkan strategi pencapaian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagai berikut.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan pengelolaan pajak berbasis *online* pada seluruh jenis Pajak Daerah, dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b) Penguatan database wajib pajak melalui pemutakhiran data subyek dan objek pajak, antara lain:

- Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan kondisi wilayah;
 - Sensus Pajak terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assesment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
 - d) Melakukan *law enforcement*/ penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
 - e) Peningkatan kinerja pelayanan pajak melalui pelayanan berbasis *online*;
 - f) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak;
 - g) Menginisiasi koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/ Lembaga dalam rangka peningkatan Wajib Pajak, peningkatan kualitas SDM Daerah, dan Kerjasama pemeriksaan Pajak;
 - h) Meningkatkan pendapatan opsen PKB dengan memperkuat dukungan pada penggalan data, penagihan, dan perumusan SOP yang efektif.
- 2) Retribusi Daerah
- Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (*e-retribusi*);

- b) Menerapkan integrasi pelayanan retribusi daerah dengan sistem perbankan, untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan bagi Wajib Retribusi;
 - c) Menerapkan transaksi non tunai dalam pemungutan retribusi daerah;
 - d) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran retribusi daerah.
 - e) Melakukan *appraisal* untuk menggali potensi retribusi;
 - f) Melakukan pembinaan pada BLUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten agar pendapatan BLUD optimal;
 - g) Mengembangkan model proyeksi pendapatan BLUD agar lebih akurat dalam proyeksi target pendapatan;
 - h) Melakukan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga dan mengimplementasikannya;
 - i) Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 3) Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat meningkatkan laba BUMD;
 - b) Sinergitas antar BUMD agar satu sama lain dapat menimbulkan efek *leverage*.
 - c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito,

pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, diperlukan suatu kebijakan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

b. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik serta Dana Alokasi Umum *Specific Grant* dapat disalurkan dengan lebih optimal.
- b) Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada Pemerintah Provinsi untuk memastikan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- c) Inisiasi Kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat;
- b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Menitikberatkan pada pencapaian RPD Tahun 2024-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, dan Urusan Pilihan serta urusan penunjang;
- b) Mendorong kegiatan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong ketahanan energi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan kualitas layanan Kesehatan, mendukung efektivitas MBG, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, dan akselerasi investasi;
- c) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- e) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan, Infrastruktur pelayanan publik, belanja wajib yang bersumber dari pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta kewajiban lain sesuai perundang-undangan;
- f) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - Bantuan keuangan, pemberian dana transfer untuk desa baik yang bersifat umum maupun khusus. Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- g) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pinjaman Dalam Negeri.

Selain itu, Pemerintah Daerah akan membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat. Secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, terutama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim, serta program prioritas lainnya.

BAB 8

PENUTUP

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas serta mendukung pembangunan sesuai dengan Visi Misi Kabupaten, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 perlu didukung oleh pengelolaan kegiatan yang disiplin dan Amanah pada semua tingkatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026, selanjutnya ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Purwokerto,

Agustus 2025

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	520.224.100.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	594.775.900.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.000.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.518.951.939.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.318.185.593.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.766.346.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.718.951.939.000,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.228.800.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.228.800.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.228.800.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.873.180.739.000,00	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Budaya Literasi, Pengelolaan Olahraga dan Kebudayaan Banyumas untuk Penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang Unggul						

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Presentase peningkatan prestasi olahraga pemuda			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	10.948.500.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

					Dinas Pendidikan	1.612.496.200,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

					Dinas Pendidikan	40.925.000,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

					Dinas Pendidikan	621.158.367,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

					Dinas Pendidikan	917.805.433,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.535.035.000,00	
				Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	319.535.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rata rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	319.535.000,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dilakukan Pengembangan, Pengolahan, Pengalih mediaan untuk di lestarikan dan di dayagunakan			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	46.965.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Kecamatan Kebasen	59.000.000,00	

					Dinas Pendidikan	7.015.000,00	
2	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi						

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00	
				Persentase Kepemilikan KTP Elektronik			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00	
				Persentase Penerbitan Dokumen Pendafrtan Penduduk Sesuai Standar Pelayanan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	236.430.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.570.000,00	
				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	120.000.000,00	
				Presentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	120.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase dari rata-rata jumlah user Sistem Informasi Administrasi Kependudukan aktif			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	406.393.000,00	
				Persentase pengelolaan SIAK dan pemanfaatan aplikasi Pendukung SIAK berjalan dengan baik			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	488.593.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase Profil data Kependudukan Kabupaten Banyumas yang tersusun			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60.000.000,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.000.000,00	
				Presentase desa mandiri			
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Persentase Desa yang di Fasilitas Kerjasamanya			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	107.500.000,00	
				Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa			
					[object Object]	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase BUMDES dengan klasifikasi berkembang dan maju			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.337.500.000,00	
				Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas Tata kelola Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.337.500.000,00	
				Persentase Kapasitas Aparatur Desa dan BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.337.500.000,00	
				Presentase Desa Administrasi Baik			
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaannya			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	945.000.000,00	
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif			
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.130.523.040,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.790.000.000,00	
				Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase sistem elektronik yang diamankan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	580.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase pengelolaan arsip statis sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Pemerintah Kabupaten Banyumas			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	65.000.000,00	
				Persentase pengelolaan arsip statis sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	200.000.000,00	
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	265.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	40.000.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Persentase Arsip Tertutup yang Diizinkan untuk Digunakan			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.000.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	10.370.000,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Nilai LPPD Pemerintah Daerah			
					Sekretariat Daerah	11.350.001.100,00	
				Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	10.705.001.000,00	
				Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang terfasilitasi			
					Sekretariat Daerah	70.000.000,00	
				Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi			
					Sekretariat Daerah	575.000.100,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase BUMD yang memenuhi rasio keuangan sehat sesuai standar regulasi			
					Sekretariat Daerah	350.000.000,00	
				Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			
					Sekretariat Daerah	449.993.800,00	
				Persentase Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Penilaian Mandiri SPIP sesuai target			
					Sekretariat Daerah	369.526.220,00	
				Persentase rapat koordinasi terkait kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai target			
					Sekretariat Daerah	330.000.000,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Presentase pemenuhan layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			
					Sekretariat DPRD	20.117.905.536,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Kualitas sasaran strategis			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	815.000.000,00	
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	765.000.000,00	
				Persentase Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	60.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ketercapaian program prioritas			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	825.000.000,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase capaian SAKIP komponen perencanaan kategori memuaskan pada perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	479.000.000,00	
				Persentase capaian SAKIP komponen perencanaan kategori memuaskan pada perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	733.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase ketepatan waktu penetapan APBD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	658.809.811.757,00	
				Persentase penyampaian LKPD tepat waktu			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.263.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	450.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opsen PKB-BPNKB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu			
					Badan Pendapatan Daerah	1.400.000.000,00	
				Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak PBB dan BPHTB			
					Badan Pendapatan Daerah	1.400.000.000,00	
				Persentase Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
					Badan Pendapatan Daerah	1.400.000.000,00	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase nilai inovasi perangkat daerah kategori inovatif			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	720.000.000,00	
				Persentase penerapan hasil riset			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	720.000.000,00	
				Persentase riset yang diusulkan untuk publikasi ilmiah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	720.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa			
					Inspektorat Daerah	2.196.766.000,00	
				Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD			
					Inspektorat Daerah	2.196.766.000,00	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan			
					Inspektorat Daerah	2.196.766.000,00	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan			
					Inspektorat Daerah	2.196.766.000,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Level kapabilitas APIP			
					Inspektorat Daerah	4.927.112.000,00	
				Persentase desa berisiko tinggi			
					Inspektorat Daerah	4.927.112.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				IKM Pelayanan Kecamatan			
					Kecamatan Jatilawang	5.923.000,00	
					Kecamatan Karanglewas	30.800.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kebasen	8.550.000,00	
					Kecamatan Kembaran	14.585.000,00	
					Kecamatan Purwojati	13.350.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	73.009.750,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	50.000.000,00	
					Kecamatan Sumbang	9.000.000,00	
				IKM Pelayanan Kecamatan			
					Kecamatan Purwojati	3.100.000,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Banyumas	32.000.000,00	
					Kecamatan Rawalo	14.146.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	750.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	1.500.000,00	
				Indeks Kepuasan Masyarkat			
					Kecamatan Sumpiuh	1.500.000,00	
				Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan			
					Kecamatan Sumpiuh	375.000,00	
				persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan			
					Kecamatan Purwokerto Barat	18.397.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan			
					Kecamatan Kembaran	17.335.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan			
					Kecamatan Ajibarang	17.000.000,00	
					Kecamatan Baturraden	17.600.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Cilongok	9.150.000,00	
					Kecamatan Gumelar	3.550.000,00	
					Kecamatan Jatilawang	1.758.000,00	
					Kecamatan Kalibagor	8.215.000,00	
					Kecamatan Kedungbanteng	10.500.000,00	
					Kecamatan Kemranjen	10.419.000,00	
					Kecamatan Lumbir	10.100.000,00	
					Kecamatan Patikraja	13.620.000,00	
					Kecamatan Pekuncen	20.450.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	51.437.000,00	
					Kecamatan Rawalo	33.146.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	7.000.000,00	
					Kecamatan Somagede	27.545.000,00	
					Kecamatan Wangon	20.700.000,00	
				Persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar pelayanan (SP)			
					Kecamatan Tambak	22.200.000,00	
				Persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar pelayanan (SP)			
					Kecamatan Karanglewas	30.800.000,00	
					Kecamatan Kebasen	9.450.000,00	
					Kecamatan Purwojati	16.450.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	21.572.750,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	92.800.000,00	
					Kecamatan Sumbang	39.000.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	1.125.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)			
					Kecamatan Purwokerto Timur	45.000.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (SP)			
					Kecamatan Purwokerto Timur	5.000.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)			
					Kecamatan Banyumas	10.000.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)			
					Kecamatan Jatilawang	4.165.000,00	
					Kecamatan Lumbir	4.500.000,00	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan Sesuai dengan Standar Pelayanan(SP)			
					Kecamatan Cilongok	2.450.000,00	

					Kecamatan Kalibagor	2.200.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Selatan	36.069.290,00	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan			
					Kecamatan Jatilawang	18.950.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	42.750.000,00	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan			
					Kecamatan Karanglewas	34.000.000,00	
					Kecamatan Purwojati	32.475.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	16.300.000,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Somagede	21.875.000,00	
				persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Barat	840.980.100,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Ajibarang	31.895.000,00	
					Kecamatan Banyumas	38.225.000,00	
					Kecamatan Baturraden	28.735.000,00	
					Kecamatan Cilongok	32.125.000,00	
					Kecamatan Gumelar	13.950.000,00	
					Kecamatan Kalibagor	28.285.000,00	
					Kecamatan Karanglewas	34.000.000,00	
					Kecamatan Kebasen	16.420.000,00	
					Kecamatan Kembaran	1.600.000,00	
					Kecamatan Lumbir	68.050.000,00	
					Kecamatan Purwojati	32.475.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Barat	304.550.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	52.369.290,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	1.145.420.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	331.850.000,00	
					Kecamatan Rawalo	50.405.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	24.200.000,00	
					Kecamatan Somagede	23.650.000,00	
					Kecamatan Sumbang	43.000.000,00	
					Kecamatan Tambak	37.200.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Wangon	34.200.000,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan			
					Kecamatan Kedungbanteng	27.125.000,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kedungbanteng	4.250.000,00	
				Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Kembaran	20.150.000,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Jatilawang	18.950.000,00	
					Kecamatan Lumbir	27.200.000,00	
					Kecamatan Patikraja	37.000.000,00	
					Kecamatan Pekuncen	30.950.000,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Barat	552.070.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	1.800.105.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	6.200.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	608.600.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	31.530.000,00	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Selatan	300.100.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	300.000.000,00	
				Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Utara	1.216.025.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	300.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
					Kecamatan Sumpiuh	300.000.000,00	
				Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Purwokerto Timur	242.000.000,00	
				Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
					Kecamatan Kemranjen	33.340.750,00	
				undefined			
					Kecamatan Purwokerto Timur	236.820.000,00	

					Kecamatan Patikraja	4.000.000,00	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase koordinasi pencegahan gangguan dan ketertiban umum			
					Kecamatan Kembaran	1.100.000,00	
				Persentase Koordinasi Pencegahan Gangguan Trantibum			
					Kecamatan Kembaran	55.100.000,00	
				persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Purwokerto Barat	44.630.000,00	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Ajibarang	4.625.000,00	
					Kecamatan Baturraden	31.385.000,00	
					Kecamatan Cilongok	47.580.000,00	
					Kecamatan Gumelar	41.750.000,00	
					Kecamatan Kalibagor	44.625.000,00	
					Kecamatan Karanglewas	1.710.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kebasen	1.350.000,00	
					Kecamatan Purwojati	9.900.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	24.360.750,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	13.750.000,00	
					Kecamatan Rawalo	45.135.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	10.100.000,00	
					Kecamatan Somagede	16.450.000,00	
					Kecamatan Sumbang	28.000.000,00	
					Kecamatan Tambak	5.000.000,00	
					Kecamatan Wangon	3.750.000,00	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Kedungbanteng	19.375.000,00	
				Persentase pelaksanaan Koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Purwokerto Timur	3.400.000,00	
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Purwokerto Timur	5.000.000,00	
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Jatilawang	12.825.000,00	
					Kecamatan Lumbir	13.217.500,00	
					Kecamatan Patikraja	19.700.000,00	
					Kecamatan Pekuncen	63.050.000,00	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Kebasen	750.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	55.071.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penanganan gangguan tramtibum			
					Kecamatan Karanglewas	28.710.000,00	
					Kecamatan Purwojati	9.900.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	24.360.750,00	
				Persentase penanganan gangguan trantibum			
					Kecamatan Jatilawang	12.825.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	3.400.000,00	
				Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas			
					Kecamatan Sumpiuh	1.050.000,00	
				Presentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Karanglewas	27.000.000,00	
				Presentase pelaksanaan kordinasi Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Kemranjen	58.000.000,00	

					Kecamatan Sokaraja	3.250.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Cilongok	15.650.000,00	
				Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Urusan Pmerintahan Umum			
					Kecamatan Lumbir	41.900.000,00	
				Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Jatilawang	16.000.000,00	
				Persentase efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					Kecamatan Karanglewas	34.700.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kebasen	44.250.000,00	
					Kecamatan Purwojati	61.000.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	61.375.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	57.850.000,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	62.150.000,00	
					Kecamatan Sumbang	70.000.000,00	
				Persentase Efektivitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Tambak	1.250.000,00	
				persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum			
					Kecamatan Purwokerto Barat	16.320.000,00	
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Ajibarang	47.800.000,00	
					Kecamatan Baturraden	31.500.000,00	
					Kecamatan Gumelar	33.000.000,00	
					Kecamatan Kalibagor	16.275.000,00	
					Kecamatan Kedungbanteng	54.000.000,00	
					Kecamatan Kembaran	4.750.000,00	
					Kecamatan Patikraja	25.250.000,00	
					Kecamatan Pekuncen	26.200.000,00	
					Kecamatan Rawalo	60.300.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	54.000.000,00	
					Kecamatan Somagede	61.125.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	10.425.000,00	
					Kecamatan Wangon	5.250.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Kemranjen	15.250.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang belaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Karanglewas	16.700.000,00	
				Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tepat			
					Kecamatan Banyumas	14.350.000,00	
				Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Cilongok	15.100.000,00	
				Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Ajibarang	17.550.000,00	
					Kecamatan Baturraden	10.950.000,00	
					Kecamatan Kebasen	23.230.000,00	
					Kecamatan Rawalo	25.000.000,00	
					Kecamatan Sokaraja	11.355.000,00	
					Kecamatan Somagede	15.065.000,00	
					Kecamatan Sumbang	28.500.000,00	
					Kecamatan Sumpiuh	6.325.000,00	
				Persentase Fasilitasi PenyusunanAPBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Wangon	6.450.000,00	
				Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Tepat Waktu			
					Kecamatan Kembaran	21.925.000,00	
					Kecamatan Patikraja	31.150.000,00	
					Kecamatan Pekuncen	42.140.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Lumbir	23.950.000,00	
				Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan			
					Kecamatan Purwojati	21.350.000,00	
				Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan			
					Kecamatan Kedungbanteng	27.375.000,00	
					Kecamatan Tambak	24.545.000,00	
				Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan			
					Kecamatan Jatilawang	4.230.000,00	
				Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Gumelar	10.200.000,00	
					Kecamatan Kalibagor	16.400.000,00	
				Presentase Fasilitas Penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu			
					Kecamatan Kemranjen	8.354.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM Internal Perangkat Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	8.000.516.762,00	
				IKM Perangkat Daerah			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	32.209.000,00	
				IKM Perangkat Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	13.761.762.638,00	
					Dinas Pertanian	18.953.865.749,00	
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	176.342.774,00	
				IKM Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	5.000.000,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
					Kecamatan Gumelar	1.796.065.484,10	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Gumelar	4.582.000,00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
					Kecamatan Gumelar	50.500.000,00	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
					Kecamatan Gumelar	50.500.000,00	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
					Kecamatan Gumelar	1.796.065.484,10	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
					Kecamatan Gumelar	198.702.200,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
					Kecamatan Gumelar	1.796.065.484,10	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
					Kecamatan Gumelar	122.422.223,90	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
					Kecamatan Gumelar	122.422.223,90	
				Nilai kematangan organisasi			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	14.508.244.638,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	32.209.000,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.473.866.000,00	
					Dinas Pertanian	18.953.865.749,00	
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	176.342.774,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Kecamatan Purwokerto Timur	8.550.000,00	
				Persentase IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	748.752.400,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	272.790.700,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada perangkat daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	45.000.000,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	13.714.492.238,00	
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.677.398.000,00	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.047.720.614,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	10.492.204.762,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.540.536.693,00	
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	22.258.417.033,00	
					Dinas Pertanian	18.953.865.749,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	176.342.774,00	
					Sekretariat Daerah	34.516.187.285,00	
					Sekretariat DPRD	15.675.349.827,00	
				Persentase Kesesuaian Program Renja dengan DPA			
					Kecamatan Kedungbanteng	3.250.000,00	
				Persentase Kesesuaian Program Renja dengan Renstra			
					Kecamatan Kedungbanteng	3.250.000,00	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah			
					Kecamatan Karanglewas	52.990.000,00	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
					Kecamatan Purwokerto Timur	27.176.000,00	
				Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusa			
					Kecamatan Purwokerto Timur	143.077.952,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.652.398.000,00	
					Dinas Pertanian	50.000.000,00	
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	17.720.000,00	
					Kecamatan Jatilawang	208.500,00	
					Kecamatan Kedungbanteng	2.064.834.984,00	
					Kecamatan Purwojati	7.050.000,00	
					Kecamatan Tambak	100.940.500,00	
					Sekretariat Daerah	34.516.187.285,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	25.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	14.508.244.638,00	
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	26.000.000,00	
					Dinas Pertanian	50.000.000,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	8.606.550.265,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.501.901.522,00	
					Badan Pendapatan Daerah	19.998.170,00	
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13.643.272.113,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.867.832.497,00	
					Kecamatan Ajibarang	2.798.586.092,00	
					Kecamatan Banyumas	543.082.340,00	
					Kecamatan Baturraden	2.400.368.889,00	
					Kecamatan Cilongok	2.255.760.156,00	
					Kecamatan Kalibagor	2.406.060.569,00	
					Kecamatan Karanglewas	2.326.323.630,00	
					Kecamatan Kebasen	2.455.339.273,00	
					Kecamatan Kedungbanteng	377.137.240,00	
					Kecamatan Kembaran	2.411.035.921,00	
					Kecamatan Kemranjen	335.586.000,00	
					Kecamatan Lumir	183.477.934,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Patikraja	2.381.798.023,00	
					Kecamatan Purwojati	1.808.754.643,00	
					Kecamatan Purwokerto Barat	9.669.701.982,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	8.328.814.067,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	8.097.823.529,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	9.275.075.296,00	
					Kecamatan Rawalo	2.124.355.366,00	
					Kecamatan Sokaraja	2.775.300.686,00	
					Kecamatan Somagede	720.000,00	
					Kecamatan Sumbang	2.338.072.180,00	
					Kecamatan Sumpiuh	5.444.021.821,00	
					Kecamatan Tambak	2.287.585.349,00	
					Kecamatan Wangon	2.325.635.120,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Jatilawang	3.117.332.834,00	
					Kecamatan Purwokerto Selatan	220.102.520,00	
					Kecamatan Purwokerto Timur	346.000.000,00	
					Kecamatan Somagede	1.957.290.916,00	
					Kecamatan Sumpiuh	396.524.770,00	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan			
					Kecamatan Karanglewas	104.472.968,00	
				Persentase pengelolaan administrasi umum			
					Kecamatan Kembaran	99.599.000,00	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sumpiuh	117.885.456,00	
				Persentase penunjang layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Kecamatan Wangon	207.714.000,00	
				Persentase penunjang urusan pemerintah kecamatan			
					Kecamatan Cilongok	492.013.100,00	
				Persentase realisasi APBD perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	45.000.000,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	14.463.244.638,00	
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	7.592.249.623,00	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.320.511.314,00	
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	819.302.680,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	10.492.204.762,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.540.536.693,00	
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	22.258.417.033,00	
					Dinas Pertanian	18.903.865.749,00	
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	158.622.774,00	
					Sekretariat Daerah	32.172.128.005,00	
					Sekretariat DPRD	15.675.349.827,00	
				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	
					Dinas Pertanian	20.478.784.789,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah	20.981.141.906,00	
					Kecamatan Purwokerto Utara	84.033.572,00	
					Kecamatan Sumpiuh	39.065.000,00	
					Sekretariat DPRD	43.918.672.714,00	
				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Kecamatan Kemranjen	6.270.000,00	
				Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Kemranjen	2.036.444.144,00	
					Kecamatan Lumbir	2.097.934.089,00	
					Kecamatan Sumpiuh	130.452.403,00	
				Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Purwokerto Barat	25.200.000,00	
				Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah			
					Kecamatan Purwokerto Utara	555.479.904,00	

					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	51.791.551.244,00	
					Kecamatan Purwokerto Barat	24.900.000,00	
					Kecamatan Somagede	30.330.000,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000,00	
3	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha dalam Rangka Peningkatan Pendapatan dan Penurunan Pengangguran						

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase lulusan pelatihan yang bekerja			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.106.876.200,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	200.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang dipromosikan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.978.000,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepedulian investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	291.629.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.279.800,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	128.796.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai kematangan organisasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.569.185.901,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.569.185.901,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.561.095.901,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.569.185.901,00	
				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.090.000,00	
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu Secara Inklusif						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				APS 7-15 Tahun			
					Dinas Pendidikan	138.181.510.255,00	
				Iklim Inklusifitas SMP			
					Dinas Pendidikan	88.970.201.996,00	
				Iklim Keamanan SMP			
					Dinas Pendidikan	88.970.201.996,00	
				Iklim Kebhinekaan SMP			
					Dinas Pendidikan	88.970.201.996,00	
				Indeks Kualitas Pembelajaran Nonformal / Kesetaraan			
					Dinas Pendidikan	1.022.611.750,00	
				Kemampuan Literasi SMP			
					Dinas Pendidikan	88.970.201.996,00	
				Kemampuan Numerasi SMP			
					Dinas Pendidikan	88.970.201.996,00	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan	3.795.606.000,00	
				Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV / S-1			
					Dinas Pendidikan	3.795.606.000,00	

					Dinas Pendidikan	29.789.000,00	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terpenuhi			
					Dinas Pendidikan	26.786.357.184,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				AKB/1000KH			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	537.425.000,00	
				AKB/1000 KH			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.929.528.000,00	
				Angka kematian Balita			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.185.000.000,00	
				Angka Kematian Balita			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	10.601.980.883,00	
				ANGKA KEMATIAN BALITA			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.014.070.000,00	
				Angka Kematian Balita/1000 KH			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	978.209.000,00	
				Angka Kematian Ibu (AKI)			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.753.460.000,00	
				Net Death Rate (NDR)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	32.500.000.000,00	
				Persentase Cakupan penerima CKG			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.753.460.000,00	
				Persentase puskesmas yang mencapai akreditasi paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.928.110.949,00	
				Persentase puskesmas yang mencapai akreditasi paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.002.888.859,00	
				Persentase Puskesmas yang mencapai akreditasi paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	456.031.000,00	
				Persentase Puskesmas yang mencapai akreditasi Paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.111.622.000,00	
				Persentase Puskesmas yang Mencapai Akreditasi Paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	937.544.000,00	
				Persentase Puskesmas Yang Mencapai Akreditasi Paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.116.717.000,00	
				PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENCAPAI AKREDITAS PARIPURNA			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.014.070.000,00	
				Prententase Puskesmas yang Mencapai Akreditas Paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.095.339.000,00	
				Prevalensi puskesmas yang mencapai akreditasi paripurna			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	698.447.000,00	
				Prevalensi Stunting			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.185.000.000,00	
				Proporsi Fasilitas Kesehatan dengan perbekalan Kesehatan yang memenuhi standar			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	350.000.000,00	

					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	34.744.594.247,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Rasio Dokter per Satuan Penduduk			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.500.000.000,00	
				Rasio Nakes dan Named terhadap populasi			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	128.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase kecamatan yang mendeklarasikan 5 pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.558.000,00	
				Persentase Kecamatan yang mendeklarasikan 5 pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	143.204.614,00	
				Persentase Kecamatan yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.072.000,00	
				Persentase Kecamatan yang Mendeklarasikan 5 Pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	10.783.000,00	
				Persentase Kecamatan Yang Mendeklarasikan 5 Pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.126.000,00	
				Presentase Kecamatan yang mendeklarasikan 5 pilar STBM			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.925.000,00	
				Rumah Tangga yang mempraktekkan buang air besar sembarangan (BABS) ditempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.558.000,00	
				Rumah tangga yang mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) ditempat terbuka			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	16.958.391,00	
				Rumah tangga yang mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.766.000,00	
				Rumah tangga yang mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) ditempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	113.844.223,00	
				Rumah Tangga yang Mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.710.000,00	
				Rumah Tangga Yang Mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.126.000,00	
				Rumah tangga yang mempraktikan buang air besar sembarang (BABS) ditempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.367.000,00	
				Rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	17.923.000,00	
				Rumah Tangga yang Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarang (BABS) di Tempat Terbuka			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.416.000,00	

					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	441.621.588,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	574.698.400,00	
				Persentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang Digunakan dalam Menyusun Kebijakan Pengendalian Penduduk			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	574.698.400,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern contraceptive (mCPR)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	10.593.128.900,00	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	10.593.128.900,00	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	10.593.128.900,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.253.607.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM Eksternal Perangkat Daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.487.196.000,00	
				IKM Eksternal Perangkat Daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	36.867.229.078,00	
				IKM External Perangkat Daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.067.131.425,00	
				Nilai Kematangan Organisasi			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	215.000.000,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	18.310.234.828,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.927.532.750,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.678.376.500,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.500.000.000,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	189.787.494.675,00	
					Dinas Pendidikan	1.071.806.669.706,50	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.651.282.000,00	
				Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	302.749.229.030,00	
				Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.990.000.000,00	

					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	87.694.575.665,00	
					Dinas Pendidikan	9.237.878.749,50	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Secara Berkelanjutan						

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.400.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase cakupan area layanan persampahan			
					Dinas Lingkungan Hidup	6.143.000.000,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.055.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900.000.000,00	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.055.000.000,00	
				Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.850.000.000,00	
				Persentase penanganan korban bencana yang tertangani			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.005.000.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terjamin kualitasnya			
					Dinas Lingkungan Hidup	390.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	58.969.000,00	
				Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	58.969.000,00	

					Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase Luasan RTH Publik terhadap Kawasan Perkotaan			
					Dinas Lingkungan Hidup	3.260.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase limbah B3 yang terkelola			
					Dinas Lingkungan Hidup	10.952.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase limbah B3 yang terkelola			
					Dinas Lingkungan Hidup	85.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
					Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
				Presentase Kelompok Masyarakat Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
					Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase jumlah sekolah adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPLHS)			
					Dinas Lingkungan Hidup	280.000.000,00	
				Persentase kader lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Lingkungan Hidup	280.000.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan			
					Dinas Lingkungan Hidup	50.079.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota			
					Dinas Lingkungan Hidup	757.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				IKM Perangkat Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.169.908.083,00	
				Nilai kematangan organisasi			
					Dinas Lingkungan Hidup	26.657.795.685,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.169.908.083,00	
					Dinas Lingkungan Hidup	26.657.795.685,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup	38.314.638.377,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.169.908.083,00	
					Dinas Lingkungan Hidup	26.657.795.685,00	
6	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda						

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	694.000.000,00	
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	694.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.890.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.000.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	254.769.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Peningkatan Wirausaha Muda			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	450.000.000,00	
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	450.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.000.000.000,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	903.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase pelaksanaan pendidikan politik			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.116.914.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.265.959.175,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.652.751.675,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.265.959.175,00	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	
				Rata-rata persentase capaian Kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.455.000,00	

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.419.084,00	
7	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah dengan Infrastruktur dan Konektivitas serta Instrumen Pendukung yang Memadai dan Berkelanjutan						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	0,00	
				Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	4.500.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase akses rumah tangga dengan akses sanitasi aman			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.177.500.000,00	
				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.177.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000,00	
				Persentase panjang jalan sebagai jalur evakuasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum	12.300.000,00	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.500.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota			
					Dinas Perhubungan	663.650.159,00	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Jalan Kabupaten/Kota			
					Dinas Perhubungan	31.518.349.841,00	
				Persentase kendaraan yang melakukan uji laik			
					Dinas Perhubungan	32.182.000.000,00	
				Persentase pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan perparkiran			
					Dinas Perhubungan	150.000.000,00	
				Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas			
					Dinas Perhubungan	2.500.000.000,00	
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas			
					Dinas Perhubungan	29.440.000.000,00	
				Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
					Dinas Perhubungan	67.000.000,00	
				Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
					Dinas Perhubungan	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
					Dinas Perhubungan	175.000.000,00	
				persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan	2.500.000.000,00	
				Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan	0,00	
				Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan	29.517.000.000,00	
				Presentase kendaraan yang melakukan uji laik			
					Dinas Perhubungan	0,00	
				Presentase wilayah yang terhubung angkutan Jalan			
					Dinas Perhubungan	15.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase prasarana angkutan sungai			
					Dinas Perhubungan	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM Eksternal Perangkat Daerah			
					Dinas Perhubungan	11.120.155.693,00	
				Nilai kematangan organisasi			
					Dinas Perhubungan	12.714.662.934,00	
				Persentase IP ASN pegawai pada perangkat daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Dinas Perhubungan	4.438.596.800,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada perangkat daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Perhubungan	354.206.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Pekerjaan Umum	52.390.266,00	
					Dinas Perhubungan	73.171.680,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Dinas Perhubungan	11.046.984.013,00	
				Persentase IP ASN Pegawai Pada Perangkat Daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Dinas Perhubungan	1.240.301.241,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum	50.590.266,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Perhubungan	19.040.087.734,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum	1.800.000,00	
					Dinas Perhubungan	17.898.479.734,00	
				Presentase IP ASN pegawai pada perangkat daerah bernilai sedang-sangat tinggi			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.160.000,00	
				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.160.000,00	
				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum	77.454.534,00	
				Presentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.160.000,00	
				undefined			
					Dinas Pekerjaan Umum	61.152.534,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi						

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Presentase PSKS yang aktif			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	240.000.000,00	
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
					[object Object]	0,00	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.000.000,00	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.295.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.423.000.000,00	
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.000.000,00	
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase makam pahlawan yang dikelola			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	
					[object Object]	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.467.146.971,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					[object Object]	0,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.467.146.971,00	
9	Meningkatkan Pengembangan Produk Potensial dan Produk Unggulan Serta Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung						

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Angka Kecukupan Energi			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80.000.000,00	
				Angka Kecukupan Protein			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Daerah			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	593.742.200,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.254.801.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	526.456.000,00	
				Persentase SDM Kepariwisata yang bersertifikat			
					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	526.456.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Produktivitas komoditas Cabai			
					Dinas Pertanian	230.000.000,00	
				Produktivitas komoditas Kopi			
					Dinas Pertanian	230.000.000,00	
				Produktivitas komoditas Padi			
					Dinas Pertanian	230.000.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Jumlah petani muda yang menerapkan hasil pelatihan bidang pertanian			
					Dinas Pertanian	525.000.000,00	
				Persentase kelompok tani yang naik kelas			
					Dinas Pertanian	525.000.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase capaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	205.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Presentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	20.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.715.455.150,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.715.455.150,00	
10	Meningkatkan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pelaku Ekonomi						

			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.000.000,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase lulusan pelatihan yang bekerja			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.000.000,00	
				Presentase lowongan kerja yang terpenuhi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi dengan Kelembagaan yang baik			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100.000.000,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase Jumlah Koperasi berstatus Sehat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	35.500.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase peserta pelatihan yang memahami materi pelatihan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	200.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	49.500.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM Perangkat Daerah			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11.171.564.494,00	
				Nilai kematangan organisasi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11.171.564.494,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11.171.564.494,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	157.972.515,00	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11.171.564.494,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	24.287.300,00	
11	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Pengembangan Pangan Lokal untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Persentase cadangan pangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.031.900.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Angka Kecukupan Energi			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	376.250.000,00	
				Angka Kecukupan Protein			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	376.250.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase Desa Rentan Rawan Pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.236.850.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.488.500.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Persentase Jumlah Perairan Umum yang Dikelola			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	110.000.000,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Angka Konsumsi Ikan			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	60.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Unit Usaha Perikanan yang Menerapkan Proses Peningkatan Nilai Tambah			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20.000.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor Pertanian			
					Dinas Pertanian	2.058.522.160,00	
				Persentase peningkatan populasi ternak			
					Dinas Pertanian	222.400.000,00	
				Produksi Daging			
					Dinas Pertanian	270.000.000,00	
				Produksi Susu			
					Dinas Pertanian	270.000.000,00	
				Produksi Telur			
					Dinas Pertanian	270.000.000,00	
				Produktivitas komoditas Cabai			
					Dinas Pertanian	2.106.122.160,00	
				Produktivitas komoditas Kopi			
					Dinas Pertanian	1.621.022.160,00	
				Produktivitas komoditas Padi			
					Dinas Pertanian	2.068.522.160,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Jumlah Jenis Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dalam Kondisi Baik			
					Dinas Pertanian	4.900.000,00	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian			
					Dinas Pertanian	2.625.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase Peningkatan Unit Usaha yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet			
					Dinas Pertanian	100.000.000,00	
				Persentase Peningkatan Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan teknis Kesmavet			
					Dinas Pertanian	100.000.000,00	
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			
					Dinas Pertanian	205.000.000,00	

					Dinas Pertanian	54.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase penanganan bencana pertanian			
					Dinas Pertanian	366.100.000,00	
				Persentase penurunan luas lahan gagal panen akibat bencana pertanian			
					Dinas Pertanian	366.100.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase unit usaha yang mematuhi regulasi perizinan			
					Dinas Pertanian	35.000.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Jumlah petani muda yang menerapkan hasil pelatihan bidang pertanian			
					Dinas Pertanian	50.000.000,00	
				Persentase kelompok tani yang naik kelas			
					Dinas Pertanian	50.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian	108.000.000,00	
				IKP Perangkat Daerah			
					Dinas Pertanian	9.000.000,00	
				Nilai kematangan organisasi			
					Dinas Pertanian	117.000.000,00	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			
					Dinas Pertanian	117.000.000,00	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	140.750.000,00	
					Dinas Pertanian	633.500.000,00	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	140.750.000,00	
					Dinas Pertanian	566.500.000,00	